

ATURAN BARU PEMKOT SOLO

Anak dan Lansia Dilarang Masuki Fasilitas Publik

SOLO (KR) - Pemkot Solo menerbitkan larangan bagi anak-anak dan orang lanjut usia (lansia) memasuki fasilitas publik seperti pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, tempat wisata, tempat bermain, serta berkumpul di tempat umum, guna menghindari kemungkinan tertular Covid-19.

Larangan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) Solo Nomor 10 Tahun 2020 tertanggal 8 Juni ini, juga diberlakukan bagi orangtua atau siapa pun mengajak anak-anak memasuki fasilitas publik tersebut.

Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo mengemukakan, kategori anak-anak dibatasi mulai dari masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun, sesuai Undang-Undang yang berlaku. "Karenanya, larangan memasuki fasilitas publik itu, berlaku pula bagi ibu hamil. Ini sebagai upaya perlindungan sekaligus penyelamatan generasi penerus bangsa dari kemungkinan tertular Covid-19," tandas Rudyatmo di Balaikota Solo, Senin (8/6).

Aturan tersebut juga dijabarkan dalam Surat Edaran Nomor 067/1078 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanganan Covid-19 tertanggal 8 Juni, dan berlaku hingga 30 Juni 2020. Sanksi atas pelanggaran tersebut, menurut Rudy, bisa berupa teguran lisan, membuat surat pernyataan tertulis untuk tidak lagi mengulang tindakannya, ataupun pemulangan paksa ke rumah masing-masing.

Zona Hijau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, Kota Tegal dan Kabupaten Rembang ditetapkan sebagai daerah zona hijau Covid-19. Untuk itu, sekolah di dua daerah tersebut diizinkan untuk dibuka. Dari hasil rapat yang dipimpin Gubernur Jateng, Senin, diputuskan sekolah diizinkan membuka kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka langsung, tetapi harus dengan melaksanakan protokol kesehatan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Jumeri mengatakan, kedua daerah tersebut ditetapkan sebagai zona hijau karena selama dua minggu tidak ada penambahan jumlah pasien positif Covid-19. Di

Jateng hanya Kota Tegal dan Rembang yang memenuhi syarat tersebut.

Meski demikian menurut Jumeri, membuka kembali sekolah di masa pandemi Covid-19 bukan perkara mudah, karena banyak juga siswa dari satu kabupaten yang bersekolah di kota lain. "Nanti kita identifikasi. Misalnya SMA 3 Semarang yang memiliki murid dari kabupaten lain ada berapa. Kalau kabupaten lain itu masih zona merah, murid bersangkutan tetap tidak boleh masuk," tutur Jumeri.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pemkab Wonosobo dr Mohamad Riyatno mengatakan, terus meningkatnya warga yang reaktif dari rapid test di pasar-pasar tradisional maupun hasil pelacakan terhadap warga kontak erat dengan pasien positif Covid-19, membuat potensi penyebaran Covid-19 di Wonosobo masih tinggi. Meski demikian dalam beberapa pekan terakhir mulai terjadi tren perlambatan penularan.

Jubir GTPP Covid-19 Kabupaten Magelang Nanda Cahyadi Pribadi mengatakan, seorang Pasien Dalam Pengawasan (PDP), meninggal, Minggu (7/6) pukul 23.20.

(Hut/Bdi/Art/Bag)-d



KR-Atiek Widyastuti H

PENUNJANG AKTIVITAS: Pesepeda mengenakan masker melintas di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Senin (8/6). Bagi sebagian masyarakat, sepeda merupakan sarana penunjang aktivitas sehari-hari, bukan sekadar untuk hobi, rekreasi atau berolahraga.

Terminal Jabodetabek Kembali Layani Bus AKAP

JAKARTA (KR) - Terminal-terminal bus di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) kembali dibuka untuk melayani bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP). Pembukaan ini dilakukan, menyusul selesainya perpanjangan larangan sementara penggunaan sarana transportasi dalam rangka pengendalian transportasi mudik/balik Hari Raya Idul Fitri 1441 H pada tanggal 7 Juni 2020.

Namun dari sembilan terminal yang melayani bus AKAP, terdapat dua terminal bus yang tetap belum melayani bus AKAP, yaitu Terminal Jatijajar Depok dan Terminal Poris Plawad Tangerang.

Sementara tujuh terminal yang sudah kembali melayani AKAP adalah Terminal Baranangsiang Bogor, Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, Terminal Kalideres, Terminal Tanjung Priok, Terminal Pulogebang,

Terminal Kampung Rambutan serta Terminal Bekasi.

Kedua terminal yang belum kembali melayani bus AKAP tersebut merupakan bagian dari empat terminal yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan. BPTJ memutuskan untuk masih menunda pelayanan bus AKAP di kedua terminal tersebut berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah/Gugus Tugas di masing-masing wilayah terminal berada, yaitu Kota Depok dan Kota Tangerang.

"Kedua wilayah tersebut, saat ini statusnya masih terus berjuang mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 menuju kondisi yang lebih baik," ujar Kepala BPTJ Polana B Pramesti di Jakarta, Senin (8/6).

Polana menyampaikan, pembukaan kembali layanan operasional bus AKAP pada Terminal Jatijajar Depok

dan Poris Plawad Tangerang akan dilakukan jika sudah mendapat rekomendasi dari Pemda/Gugus Tugas yang ada di masing-masing wilayah. "Kami akan berkomunikasi aktif dengan Pemda/Gugus Tugas di masing-masing wilayah, namun yang jelas kita semua memiliki semangat yang sama yakni memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ungkapnya.

Namun Polana menambahkan, meski Terminal Jatijajar dan Poris Plawad belum melayani AKAP, kedua terminal tersebut sudah melayani bus AKDP dan tetap beroperasi memberikan layanan bagi angkutan perkotaan dan lintas wilayah di dalam Jabodetabek (TransJabodetabek). Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, terminal-terminal di Jabodetabek juga tetap menjalankan protokol kesehatan seperti penerapan *physical distancing* berupa pembatasan jumlah penumpang maupun pengaturan tempat duduk.

(Imd)-d

KEMBALI DIGULIRKAN PRESIDEN DPR Soroti Ambang Batas Parlemen

JAKARTA (KR) - Besaran ambang batas parlemen maupun presiden kini kembali digulirkan lagi. Setelah dalam draf RUU Pemilu tertulis ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dari kursi DPR. Namun, hal itu mengundang polemik, ada yang memita ambang batas itu 7 persen dan kisaran 4 persen.

Partai Kedailan Sejahtera (PKS), kata Mardani Ali Sera memilih, ambang batas parlemen dan presiden besarnya 4 hingga 5 persen. Sebab, PKS tak ingin ambang batas yang tinggi menjadi penghalang. "PKS berpendapat ambang batas untuk presiden sama dengan ambang batas untuk parlemen agar tidak ada *barrier to entry* (penghalang untuk masuk medan juang). PKS usul ambang batas parlemen dan presiden sama di angka 4-5 persen," ujar Mardani Ali Sera dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/6).

Dalam draf RUU Pemilu, tertulis ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Sementara, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 7 persen. Ambang batas ini juga sebagai persyaratan partai politik untuk berkontestasi di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hanya parpol yang lolos ambang batas parlemen di tingkat nasional yang ikut serta dalam Pileg DPRD provinsi atau kabupaten kota. Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa dari NasDem mengatakan, draf tersebut masih belum final. Mengenai ambang batas masih menjadi perdebatan di fraksi. (Sim/Edi)-a

DIJERAT PASAL KORUPSI

Eks Mantan Kepala BP Migas Dituntut

JAKARTA (KR) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono dengan hukuman 12 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Pasalnya, kedua terdakwa tersebut dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi penunjukan langsung kondensat migas PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI).

"Menuntut supaya hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa Raden Priyono dan terdakwa Djoko Harsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer," kata Bima Suprayoga saat membaca tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/6).

Atas dasar itu, lanjut jaksa, mohon majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan masing-

masing selama enam bulan.

Tuntutan itu disampaikan, kata jaksa, karena berdasarkan dakwaan pertama yaitu Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa menyebutkan hal yang memberatkan, para terdakwa selaku pimpinan pada BP Migas tidak mendukung pemerintah dalam rangka menyelenggarakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Sedangkan hal-hal yang meringankan para terdakwa tidak menikmati uang hasil kejahatan. "Selain itu telah ada pemulih kerugian keuangan dan kerugian keuangan negara sebesar dolar 2.588.285.650,91 dolar AS yang disetorkan ke rekening pada Bank Indonesia terdiri dari pokok dan denda sebesar 2.577.626.284,39 AS, denda 10.659.366,52 dolar AS," jelas jaksa Bima.

Dalam perkara ini, Raden Priyono dan Djoko Harsono dinilai terbukti melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara senilai 2.588.285.650,91 dolar AS (sekitar Rp 37,8 triliun). (Ful)-d

DKI JAKARTA TERTINGGI

10.904 Pasien Covid-19 Sembuh

JAKARTA (KR) - Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh dari Covid-19 tertinggi, disusul Jawa Timur. Pasien sembuh di DKI Jakarta bertambah 3.206 orang, Jawa Timur 1.499 orang, Jawa Barat 952, Sulawesi Selatan 673, Jawa Tengah 428, dan wilayah lain sehingga total mencapai 10.904 orang.

Menurut catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari Senin (8/6) ada sebanyak 847 orang, sehingga totalnya menjadi 32.033 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 10.904 orang, setelah ada penambahan 406 orang. Untuk kasus meninggal bertambah 32 orang sehingga menjadi 1.883 orang.

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center GTPP Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (8/6) mengatakan, akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan 412.980 spesimen menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 103 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 71 laboratorium dan Laboratorium Jejaring (RT-PCR dan TCM) di 198 lab. Secara keseluruhan, 274.430 orang telah diperiksa dan hasilnya 32.033 positif (kumulatif) serta 242.397 negatif (kumulatif).

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau 38.791 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi 14.010 orang. (Ati)-d

RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19 RSA UGM Terus Berinovasi

YOGYA (KR) - Sebagai salah satu RS Rujukan Covid-19 di wilayah DIY, keberadaan Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM diharapkan bisa berinovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Karena inovasi dan peningkatan kualitas layanan menjadi salah satu faktor prioritas yang diharapkan bisa senantiasa diterapkan oleh RSA UGM. Dengan begitu RSA UGM dapat menjadi rumah sakit pendidikan yang berkualitas, setara dengan The John Hopkins Hospital atau Charite-University Medicine Berlin.

"Saya mengajak RSA UGM untuk terus aktif dalam upaya pencegahan wabah Covid-19 yang sedang kita alami bersama. Untuk mewujudkan hal itu, Pemda DIY siap bekerja sama, bergotong royong mewujudkan kesehatan bagi seluruh warga. Terutama dalam menyambut era kenormalan baru setelah pandemi Covid-19," kata Wakil Gubernur (Wagub) DIY Paku Alam X dalam acara peresmian bangunan Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM dengan membacakan sambutan melalui siaran video konferensi yang digelar di Gedhong Pare Anom Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (8/6).

Video konferensi tersebut juga diikuti Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Menteri Sekretaris Negara RI. Melalui prosesi tersebut, RSA UGM secara resmi telah beroperasi melayani masyarakat.

Wagub DIY mengatakan, keberadaan RSA UGM sebagai salah satu RS rujukan Covid-19 diharapkan bisa memberikan layanan secara maksimal. (Ria)-d

UNTUK MENGATASI COVID-19

P3I Salurkan Rp 10.330.000 ke PMI DIY

YOGYA (KR) - Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Pengurus Daerah Istimewa Yogyakarta (P3I Pengda DIY) menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa dana Rp 10.330.000 kepada Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PMI DIY), GBPH

Prabukusumo SPsi, di Markas PMI DIY Ringroad Barat Pelemgurih Gamping Sleman, Senin (8/6). Dana tersebut dari hasil penggalangan melalui seminar online.

"Pada Kamis (4/6) lalu, P3I bekerja sama dengan Kedaulatan Rakyat menyelenggarakan seminar

online "Pinasthika On Talk" dalam rangkaian acara Pinasthika Creativity Festival 2020. Seminar diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut, kami berhasil menggalang donasi untuk Tanggap Covid-19 di DIY dari biaya registrasi sebanyak Rp 10.330.000. Saat

ini dana tersebut kami salurkan serta percayakan pemanfaatannya melalui PMI DIY," tutur Ketua P3I Pengda DIY Arief Budiman yang didampingi Ketua Dewan Pertimbangan, Wahyoe Widiyatmo dan jajaran Pengurus P3I Pengda DIY.

Arif Budiman yang didampingi Ketua Dewan Pertimbangan, Wahyoe Widiyatmo dan jajaran Pengurus P3I Pengda DIY berharap pada rangkaian acara Pinasthika selanjutnya akan lebih banyak mengumpulkan dana kepedulian yang bermanfaat untuk masyarakat.

Sementara GBPH Prabukusumo menyampaikan rasa terima kasih kepada P3I yang menyalurkan donasinya melalui PMI DIY. Dijelaskan, pada awal pandemi Covid-19, PMI DIY baru sebatas hanya men-

distribusikan 20 sprayer untuk PMI Kabupaten/Kota guna mencegah penyebaran Covid-19.

"Selanjutnya, hasil kerja kemanusiaan PMI kami laporkan kepada berbagai pihak. Alhamdulillah, dukungan untuk penanganan Covid-19 melalui PMI DIY terus mengalir. Sampai saat ini, Relawan PMI masih di lapangan untuk menangani Covid-19. Dari mulai penyemprotan disinfektan, pelayanan ambulans, memandikan jenazah sampai pemakaman, promosi kesehatan sekaligus pendampingan psikososial," ungkap Gusti Prabu.

PMI DIY masih membuka donasi penanganan Covid-19 melalui rekening Bank Mandiri No. 137.00074.49594 atas nama Penanggulangan Bencana PMI Provinsi DIY. (Feb/Api)-d



KR-Istimewa

Jajaran Pengurus P3I DIY menyerahkan bantuan kepada PMI DIY.